

IDENTITAS POLITIK MELAYU INDONESIA DAN PENERIMAAN KONSEP NEGARA BANGSA

Hedhri Nadhiran¹, Deddy Ilyas²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹⁻²

e-mail: hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id

e-mail: deddyilyas_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki akar historis yang penuh dengan polemik. Sebelum menjadi sebuah negara bangsa, di wilayah ini telah berdiri kerajaan-kerajaan atau kesultanan (Melayu) dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kekuatan kesultanan ini sangat mendominasi dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana proses bangsa Melayu Muslim akhirnya menerima konsep negara bangsa sebagai pilihan seteah lepas dari penjajahan Bangsa Barat; Bagaimana sikap masyarakat Melayu terhadap konsep tersebut karena merupakan sesuatu yang 'baru' dan tidak dikenal dalam sejarah ataupun keyakinan yang dianut. Penelitian ini menggunakan analisis historis dengan mengumpulkan sejumlah literatur yang memuat informasi tentang perjalanan politik Melayu, mulai dari menganut sistem kerajaan hingga menjadi negara bangsa di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga tahapan proses pembentukan nasionalisme oleh Bangsa Melayu (Indonesia). Tahapan terakhir adalah berupa sikap adaptif atau menerima penerapan konsep negara bangsa sebagai identitas politik (Islam) yang baru. Sikap adaptif ini muncul karena karakter masyarakat Melayu yang toleran dan terbuka sebagai pengaruh dari kondisi goeografis wilayah dan ajaran Islam yang dianut, – umumnya – adalah Islam yang bersifat inklusif.

Kata Kunci: Identitas; Melayu; Negara Bangsa; Adaptif

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang identitas politik Melayu Indonesia dalam menghadapi gagasan negara bangsa dan bagaimana identitas tersebut bertransformasi pasca penerapan gagasan tersebut. Indonesia dipilih sebagai subjek bahasan karena Melayu identik dengan Islam, dan Islam Indonesia terkadang diidentikkan dengan Islam Asia Tenggara. Seperti dijelaskan oleh Azyumardi Azra ketika membahas tentang Islam Nusantara: Istilah 'Islam Nusantara' pada dasarnya tidaklah baru. Istilah ini mengacu pada Islam di

gugusan kepulauan atau benua maritim (nusantara) yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan juga Champa (Kampuchea). Dengan cakupan seperti itu, 'Islam Nusantara' sama sebangun dengan 'Islam Asia Tenggara' (Southeast Asian Islam). Secara akademik, istilah terakhir ini sering digunakan secara bergantian dengan 'Islam Melayu-Indonesia' (Malay-Indonesian Islam). (Azra: Republika.co.id)

Sementara itu, identitas politik dipilih karena sebelum Indonesia mengadopsi konsep negara bangsa, di wilayah nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan atau kesultanan (Melayu) yang sangat besar dan mendominasi, bahkan menjadi kekuatan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti Kesultanan Perlak (840-1292 M), Kerajaan Samudera Pasai (1261 - 1524 M), Kesultanan Aceh Darussalam (1507-1903 M), Kesultanan Palembang Darussalam (1643-1825 M), Kesultanan Ternate (1257-1915 M), Kerajaan Gowa-Tallo (abad ke-16 M), Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram Islam.

Berdirinya kerajaan atau kesultanan di tanah Melayu merupakan sesuatu yang wajar mengingat sebelum kedatangan agama Islam, entitas atau masyarakat Melayu telah memiliki ide atau gagasan politik yang dianut dan kemudian mewujudkan dalam bentuk institusi politik berupa kerajaan. Ditengarai, kehadiran Islam pada masa-masa berikutnya tampaknya tidak banyak mengubah esensi entitas politik Melayu yang sudah ada sebelumnya. Walaupun harus diakui, ada beberapa hal yang mengalami perubahan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Azyumardi Azra bahwa terdapat kontinuitas dan sekaligus perubahan dalam tradisi politik Melayu, ketika Islam datang dan menanamkan akarnya di Nusantara. (Azra: 1999)

Namun demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat dan kesultanan Melayu bukan hanya dipandang sebagai sebuah sistem keagamaan semata, tetapi sekaligus sebagai kekuatan yang cukup diperhitungkan, terutama dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme. Kesultanan-kesultanan ini sangat gigih mempertahankan wilayah nusantara dari kolonisasi Bangsa Eropa; Belanda, Inggris dan Portugis, dimana Bangsa Belanda akhirnya menjadi penguasa kolonial tunggal di Nusantara. Tercatat beberapa peperangan dan perjanjian terjadi antara kedua belah pihak selama proses kolonisasi ini, seperti Perang Aceh - Belanda yang terjadi antara 1873 - 1904 dan Perang

Menteng (Palembang-Belanda) selama tahun 1819 – 1821 M. (Pulungan: 2006)

Selama masa kolonialisasi inilah, masyarakat Melayu bersentuhan dengan konsep negara bangsa (nation state) dan kemudian diadopsi menjadi sebuah sistem politik tunggal hingga membentuk Negara Indonesia. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana budaya (politik) Melayu dalam konteks negara bangsa? Untuk menjawab persoalan ini, maka uraian akan diarahkan pada asal usul munculnya sistem politik Melayu hingga berwujud menjadi sebuah entitas atau masyarakat politik, kemunculan konsep negara bangsa dan perjumpaannya dengan sistem politik Melayu - baik berupa benturan dan atau perubahan yang terjadi pada sistem politik Melayu.

HASIL DAN DISKUSI

A. Genealogi dan Sistem Politik (Islam) Melayu

Seperti telah dijelaskan di awal bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara, wilayah ini telah dihuni oleh manusia dan pada akhirnya mereka membentuk entitas atau masyarakat politik yang disebut dengan kerajaan. Mengutip penjelasan Milner, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa kerajaan secara harfiah diartikan sebagai 'kondisi memiliki seorang raja'. Dalam pengertian ini, raja merupakan tumpuan utama kesetiaan rakyat dan menduduki tempat sentral dalam kehidupan warganya. Di luar raja dan kerajaan, tidak ada sesuatu pun.

Sejarah mencatat, pada abad VIII hingga abad XII, ketika berbagai pelabuhan di Nusantara dikunjungi banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah, khususnya Arab dan Persia, atau pada saat institusi politik Muslim belum terbentuk di dunia Melayu, hegemoni kekuatan politik di wilayah ini didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya, yang disebut oleh literatur Arab dengan Kerajaan Zabaj atau al-Mamlakat al-Maharaja, atau yang disebut Shih-li fo-shih atau san-fo chi dalam sumber-sumber Cina. (Azra: 2013) Hegemoni ini dapat dilihat antara lain dari sumber-sumber Arab yang menyebutkan dua surat-menyurat antara raja Siwijaya, Sri Indrawarman, dengan Khalifah Dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz (w. 720 H). Di dalam surat-surat itu, seraya menyatakan dirinya sebagai 'Raja Nusantara' (The King of Hind), Raja Sriwijaya menyapa Khalifah dengan sebutan 'raja Arab. (Burhanuddin: 2012)

Pada masa pra Islam, raja dengan kedudukannya yang begitu penting tidak hanya dianggap sebagai pemilik tunggal wilayah kerajaan dan warganya,

tetapi juga diyakini seperti Budha yang mencerahkan makhluk, bodhisatwa, yang 'meninggalkan nirwana untuk menetap di bumi dan membantu pembebasan spiritual para pengikutnya'. Karena keterikatan ini, rakyat harus setia dan melakukan 'bhakti' kepada raja, agar ia berkenan memberikan anugerahnya berupa keberkahan ilahi.

Kontinuitas dan perubahan budaya politik melayu pra-Islam kepada politik melayu Islam terjadi ketika Islamisasi kepulauan Nusantara berlangsung secara massive, setidaknya sejak Islamisasi Melayu pada paruh abad ke-13. Ini ditandai dengan terjadinya proses konversi agama dan sekaligus pengadopsian kosa kata politik Islam, oleh penguasa lokal, diikuti para elite istana, yang selanjutnya disusul oleh seluruh rakyat. Dengan konversi penguasa ke Islam, 'entitas' politik yang selama ini dikenal sebaagi 'kerajaan', kini secara resmi disebut 'kesultanan'. Gelar sultan juga diambil alih untuk digunakan, selain sebutan lokal, 'raja'. (Azra: 2013) Seperti yang terjadi pada penguasa Kerajaan Pasai, Marah Silu. Ia masuk Islam tidak lama setelah memangku kekuasaan, memakai nama Malik al-Saleh dan menggunakan gelar 'Sultan'. Sultan Malik al-Saleh digambarkan sebagai raja pertama di Kerajaan itu yang memeluk agama Islam sehingga para sejarahwan - berdasarkan data-data historis yang ada, berkesimpulan bahwa Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara pada akhir abad ke-13. (Burhanuddin: 2012). Penggantian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari proses Islamisasi, apalagi mengingat entitas politik Muslim di Timur Tengah yang disebut 'kekhalifahan' pada esensinya tidak berbeda dengan kerajaan karena mereka juga berpijak pada prinsip monarki.

Kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara tampaknya tidak banyak mengubah esensi entitas politik Melayu pra Islam. Lebih khusus lagi dalam hal konsepsi mengenai raja dan kerajaan. Budaya politik Melayu pra Islam yang menempatkan raja sebagai pusat dari segala kehidupan, sosok yang sempurna dan pemilik tunggal wilayah kerajaan seolah mendapat legitimasi dari Islam, melalui ulama (guru pengembara) yang menyandang posisi sebagai penasihat para raja dan memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan ajaran Islam di kerajaan.

Munculnya Islam berorientasi raja tidak perlu dipertanyakan. Konsep ini merupakan adopsi dari gagasan dasar keyakinan sufi tentang 'manusia sempurna' (insan kamil) dan karenanya memberi kontribusi bagi Islamisasi nusantara. Sebagian karena kelenturan watak sufi inilah yang membuat Islamisasi berlangsung mulus di wilayah-wilayah kerajaan yang ditandai

dengan Islamnya para raja-raja lokal. Dengan menerima Islam, para raja sama sekali tidak mengancam basis ideologi kerajaan mereka. Justru berperan bagi meningkatnya gagasan politik para raja yang mahakuasa.

Untuk mendukung legitimasi di atas, dalam tradisi politik Melayu, para raja membuat cerita dengan memasukkan kisah Iskandar Zulkarnain sebagai upaya pelegitimasi politik berbasis agama bagi para raja Melayu. (Burhanuddin: 2012) Mereka juga mengusahakan gelar sultan tidak hanya dari para guru pengembara, melainkan juga dari penguasa politik dan keagamaan di Timur Tengah. Berbagai riwayat tentang kegigihan sebagian penguasa Muslim Melayu Indonesia untuk mendapatkan gelar sultan dari otoritas politik di Timur Tengah, tidak hanya menunjukkan hasrat kuat mereka mendapatkan legitimasi tambahan, tetapi juga mengisyaratkan keinginan mengasosiasikan diri dengan pusat-pusat politik keagamaan Islam. Dengan kata lain, entitas dan Muslim polities di kawasan ini ingin diakui sebagai bagian integral dari dar al-Islam. Contoh paling konkrit adalah Aceh yang secara resmi menyatakan kepada penguasa Turki Usmani sebagai sebuah vassal state dari Kesultanan Usmani.

Dalam upaya meningkatkan legitimasi dan aura kekuasaannya, para penguasa muslim Melayu juga mengklaim diri sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah). Beberapa gelar lainnya seperti Khalifatul mukmi, Zhillullah fil ardh jelas mempertinggi sifat dan aura divinity dalam kekuasaan mereka. Kekuasaan tanpa batas sebagai penguasa diperkuat melalui konsep "daulat" yang dimaknai dalam bahasa politik melayu nusantara sebagai kekuatan dan kekuasaan mutlak raja yang bersumber dari kualitas sakral raja. Semua hal di atas menempatkan penguasa dalam kedudukan yang amat tinggi vis a vis warganya. Warga masyarakat di Dunia Melayu disebut ra'yat (rakyat) yang secara harfiah berarti mereka yang digembala atau dituntun. Secara variatif, rakyat vis a vis penguasa menyebut diri mereka 'ptik', 'hamba', atau 'abdi', yang berarti sahaya atau budak. Kepatuhan mutlak dituntut oleh penguasa dari setiap rakyatnya. Melawan penguasa adalah bentuk pembangkangan dan kedurhakaan.

Seiring dengan proses Islamisasi yang terus berjalan, konsep politik Muslim Melayu seperti diatas mulai memudar. Gagasan Islam berorientasi syariat yang mulai bergema pada abad ke-17, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Pemikiran sufi wahdatul wujud Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani mulai mendapat saingan dari ulama beraliran syariat, seperti

Nuruddin al-Raniry dan Abdurrauf al-Singkeli. Akibatnya, budaya politik raja makin Islami.

Titik balik yang menandai perubahan konsep politik Melayu mulai abad ke-17 ini, terjadi bersamaan dengan terbangunnya jaringan Nusantara dengan Timur Tengah, khususnya Mekkah. Ulama-ulama pada periode ini, seperti al-Raniry, al-Singkeli dan al-Maqassari bertanggung jawab dalam mendiseminasikan pemikiran Islam 'baru' dan menyalurkan ide-ide keagamaan dari Timur Tengah ke Nusantara terutama lewat karya-karya yang mereka hasilkan. Peran penting ulama juga dibangun melalui institusi hukum, qadhi. Lembaga/jabatan qadhi membentuk salah satu kedudukan penting ulama dalam sistem peradilan, yang memberi mereka peluang memiliki otoritas keagamaan. Melalui lembaga qadhi inilah hukum Islam (syariat) dirumuskan dan fatwa dikeluarkan. Disini terlihat bahwa kekuasaan raja/sultan tidak lagi bersifat mutlak karena mereka berbagi kekuasaan dengan ulama terutama di bidang hukum agama. Putusan mereka juga bukan satu-satunya hukum tertinggi karena terdapat lembaga qadhi yang dapat mengeluarkan fatwa keagamaan.

Sebagai akibat dari memudarnya peran raja dan kerajaan sebagai penguasa mutlak, hubungan antara raja dan rakyat juga semakin mendekat walaupun kepatuhan dan ketundukan itu tetap ada. Menurut Mohd Yusuf Hashim, hubungan sistem kekuasaan lebih berupa hubungan simbiotik atau timbal balik yang saling mempengaruhi. Sistem kekuasaan membangun solidaritas sosial dengan rakyatnya jika ingin kekuasaannya berlangsung baik dan langgeng. Dalam kitab Sulalat al-Salatin, misalnya, Sultan Manshur Shah dari Malaka yang memberikan nasihat kepada putranya, Raja Ahmad, tentang hubungan simbiotik ini. Demikian pula dalam kitab Taj al-Salatin tercantum tentang kultur Melayu berkaitan syarat-syarat menjadi raja yang mencakup persyaratan jasmaniah dan ruhaniah, seperti laki-laki yang sudah akil baligh, tampan, gagah, berani, berpengetahuan luas, pemurah, dan mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji. Bahkan, kualitas ruhaniah seorang raja, yakni sifat adil, dinyatakan sebagai syarat dan sifat utama yang harus dimiliki, karena raja itu adalah "lambang" keadilan.

Kondisi ini terjadi karena tradisi politik yang ingin dibentuk dan dikembangkan oleh raja-raja Melayu, seperti dijelaskan oleh Azyumardi Azra, adalah tradisi politik sunni, yang menekankan kesetiaan rakyat kepada penguasa, dan kepatuhan penguasa pada prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai akhlak. Berbagai kitab Undang-Undang yang ditulis selama masa ini

dan menjadi panduan hukum bagi negara dan masyarakat, memang bersumber dari kitab-kitab karya para ulama sunni di berbagai pusat keilmuan dan kekuasaan Islam di Timur Tengah. Kitab undang-undang tersebut, yang biasanya ditulis atas perintah raja atau sultan, menunjukkan ajaran-ajaran syariah sebagai bagian integral dalam pembinaan tradisi politik di kawasan ini.

Menarik untuk dicermati adalah walaupun kekuasaan raja mulai memudar, tetapi penerapan tradisi politik sunni tetap melanggengkan kekuasaan tertinggi di tangan raja dalam batas-batas tertentu. Apabila raja membuat suatu keputusan, maka rakyat wajib mengikuti dan melaksanakan perintah tersebut, walaupun kadang-kadang berat dilaksanakan. Meskipun dalam beberapa situasi, perintah itu dilihat berat sebelah dan tidak adil. Namun, ini tidak berarti bahwa di zaman kesultanan Melayu tidak terdapat golongan yang mencoba menolak perintah raja. Hal ini dapat disimak dari peristiwa Laksmana Hang Jebat yang menolak perintah bunuh dari raja terhadap Laksmana Hang Tuah. Hang Jebat mewakili golongan yang menolak ketidak-adilan karena berpandangan bahwa sebuah perintah harus didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan. Dari peristiwa tersebut akhirnya muncul ungkapan yang menjadi pegangan orang Melayu yaitu 'raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah'. (Roza: 2016).

B. Budaya Politik Melayu dalam Konteks Negara Bangsa

Konsep negara bangsa atau nation state adalah konsep tentang negara modern yang berkaitan erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Disini, suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara dalam terminologi modern jika setidaknya telah memenuhi beberapa syarat pokok, seperti wilayah dan penduduk yang merupakan modal awal sebuah bangsa, juga memiliki batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah dan pengakuan dari negara lain. (Rosyada: 2005) Karena pentingnya pemahaman tentang konsep ini, maka untuk mendapatkan pemahaman yang utuh akan dijelaskan secara lebih detil istilah pembentuknya, yaitu negara dan bangsa.

Secara historis, kata state (negara) muncul dalam pengertian modern sebagai badan politik pertama kali di Italia pada awal abad ke-16. Makna awal kata ini adalah sebuah tanah (wilayah) yang sekaligus memiliki pemerintah (rulers) dan pemerintahan (government). (Miftah: 2015)

Adapun Rumusan tentang negara (state) mempunyai beberapa definisi, seperti Roger H. Soltau yang menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur masyarakat atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama; Harold J. Laski mengemukakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu dan kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu; Robert M. MacIver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberikan kekuatan memaksa. (Pulungan: 2006) Sementara menurut Miriam Budiharjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warganegarannya taat pada peraturan perundangan melalui penguasaan kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. (Budiarjo: 1987)

Adapun term bangsa (nation) sering dimaknai dengan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu. Bangsa adalah kesatuan karakter, kesamaan watak yang lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama. Karena itu tidak heran jika keberadaan bangsa, dapat dilacak dari akar kesejarahan yang membentuknya.

Secara umum, sesuatu bisa disebut sebagai bangsa jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut: 1) Ada sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu. 2) Berada dalam suatu wilayah tertentu. 3) Ada kehendak untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. 4) Secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setujuan dan secita-cita. 5) Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain- lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Menurut para ahli, konsep bangsa (nation) dapat dilacak pada sejarah terbentuknya masyarakat Eropa Periode Barbarian, dan atau tahun 1100 M ketika masa ini kesadaran berbangsa di negara-negara Eropa telah muncul. Namun mereka mengakui bahwa kesadaran berbangsa tersebut masih tenggelam di bawah prinsip-prinsip keagamaan dan dinasti hingga abad ke-19 dimana nasionalisme mulai mendapatkan bentuk jadinya terutama setelah adanya penyebaran gagasan-gagasan tentang kedaulatan rakyat yang

mengidentifikasi massa rakyat sebagai sumber kekuasaan dan nilai. Dengan kata lain, nasionalisme atau kebangsaan mendapatkan momentum untuk berkembang secara pesat seiring dengan meluasnya gagasan tentang demokrasi, sebuah gagasan tentang kedaulatan rakyat.

Memperkuat argumentasi di atas, Hutkinson mengidentifikasi lima perbedaan mendasar antara bangsa sebagai gejala modern dengan bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat yang pernah dikenal sebelum abad ke-19. Pertama, negara bangsa mendasarkan legitimasi pada “will” (kemauan) masyarakat untuk bersatu. Kedua, Teritorial negara bangsa bukan merupakan kelanjutan kelanjutan atau warisan dari basis territorial bentuk-bentuk pengorganisasian politik sebelum abad ke-19. Ketiga, bangsa dibangun tidak atas batas-batas politik dan etnisitas seperti yang terjadi sebelumnya, tapi di atas kebanggaan dan penghormatan atas pelbagai kepentingan (kemajemukan). Keempat, bangsa adalah artefak dari print capitalism yang dalam raut riilnya hadir dalam rupa koran dan novel, memungkinkan suatu bangsa dapat dibayangkan. Kelima, bangsa adalah masyarakat industri dengan tingkat integrasi ekonomi tinggi ke seluruh bagian kawasannya.

Dari uraian tentang pengertian negara dan bangsa di atas, para ahli kemudian mendefinisikan negara bangsa (nation state) sebagai suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. (Madjid: 2004)

Dalam konsep negara bangsa, faktor nasionalisme atau kebangsaan menjadi sebuah landasan kuat bangunan negara. Nasionalisme yang dapat dipahami sebagai situasi kejiwaan menjadi bukti kesetiaan rakyat secara total kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Biasanya dibutuhkan sebuah dasar pembenaran untuk membentuk nasionalisme, seperti keinginan untuk menentukan nasib sendiri setelah lama dijajah oleh bangsa lain. Dasar pembenaran ini, biasanya akan mengkrystal dalam konsep paham ideology kebangsaan yang disebut nasionalisme. Dari sinilah kemudian muncul konsep-konsep turunannya, seperti bangsa, negara dan gabungan keduanya, negara bangsa, sebagai komponen yang membentuk identitas nasional.

C. Politik Melayu vis a vis Negara Bangsa

Dalam sejarah Indonesia, konsep negara bangsa muncul sejalan dengan kemunculan gerakan nasionalisme yang disuarakan oleh kelas terdidik baru

Indonesia di awal abad 20. Seperti ditulis oleh Azyumardi Azra, di awal abad ini, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan politik etis yang antara lain menghasilkan ekspansi pendidikan bagi kalangan pribumi. Liberalisasi di bidang pendidikan ini - betapapun terbatasnya, berhasil memunculkan kelas terdidik baru, sekaligus kepemimpinan baru yang mempunyai peran sentral dalam kelahiran dan pertumbuhan awal nasionalisme yang pada gilirannya menjadi nasionalisme yang lebih sempurna.

Dapat dikatakan bahwa kemunculan kelas terdidik ini merupakan awal bagi kebangkitan kesadaran kolektif rakyat di kepulauan nusantara yang sudah lama terjajah, untuk bersama melepaskan diri dari kolonialisasi Bangsa Barat. Hanya saja pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan etnik Melayu yang telah memiliki budaya politik tersendiri dan bahkan melembaga dalam institusi kerajaan? Sejauhmana penerimaan politik Melayu tradisional terhadap konsep nasionalisme dan negara bangsa?

Pertanyaan di atas akan muncul karena seperti telah dijelaskan, sebelum kedatangan Bangsa Eropa, di Nusantara telah terbentuk institusi politik Islam yang cukup tangguh, yaitu kerajaan atau kesultanan. Institusi inilah yang menjaga dan memelihara wibawa budaya politik Melayu sehingga budaya politik ini dapat terlaksana dalam keseharian. Dapat dikatakan bahwa selama masa ini, umat Islam mempunyai kemerdekaan yang luas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemerdekaan politik ini mulai terganggu ketika terjadi intervensi Bangsa Eropa terhadap institusi-institusi Islam setempat. Jatuhnya institusi politik Islam ke tangan pemerintahan Belanda sangat mempengaruhi budaya politik Melayu karena mereka mereka kini hidup dalam bayang-bayang kebijakan pemerintahan kolonial.

Akibat dari runtuhnya penjaga budaya Melayu ini, maka entitas politik Melayu Indonesia dengan segala konsepsi dan tradisinya nyaris habis dilanda kolonialisme Belanda. Mungkin, hanya pada kesultanan yang masih berdiri, budaya politik Melayu masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan skala yang sangat terbatas, seperti pengakuan wilayah kedaulatan kerajaan dan pengalihan tampuk kesultanan. Pelaksanaannya pun masih di bawah pengawasan ketat kolonial Belanda. Sebaliknya, di Semenanjung Melayu dan juga Brunei, tradisi dan sistem politik Melayu dalam segi-segi tertentu, bahkan semakin diperkokoh oleh kolonial Inggris.

Karena itu, untuk menjawab pertanyaan tentang budaya politik melayu vis a vis konsep negara bangsa sebagaimana dikemukakan di atas, agaknya

perhatian dapat diarahkan pada perkembangan gagasan nasionalisme di kawasan Nusantara, mengingat konsep nasionalisme di wilayah ini bukanlah sesuatu yang baku. Ia merupakan konsep dinamis yang mengalami perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri dan perubahan-perubahan pada tingkat global.

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa hingga sekarang, nasionalisme telah mengalami tiga tahap perkembangan. Tahap pertama adalah pertumbuhan awal dan kristalisasi gagasan nasionalisme. Tahap kedua, perkembangan yang ditandai dengan gagasan nasionalisme yang sarat dengan muatan politis ketimbang sosial kultural. Tahap ketiga, berubahnya wajah nasionalisme, dari politik kepada penekanan aspek ekonomi.

Tahap pertama sebagai tahap kemunculan nasionalisme. Fase ini ditandai dengan penyerapan gagasan nasionalisme yang selanjutnya diikuti pembentukan organisasi-organisasi protonasionalisme. Dalam banyak hal, kemunculan dan pertumbuhan protonasionalisme merupakan konsekuensi dari perubahan-perubahan cepat dan berdampak luas yang berlangsung di Asia Tenggara (Nusantara) umumnya pada dekade awal abad 20. Di antara dampak dari perubahan ini adalah munculnya kesadaran sebagian bangsa Melayu terhadap kondisi yang menimpa negerinya. Perubahan kesadaran politik ini tidak dapat dipisahkan dari situasi umum dunia Islam yang pada abad ke-19 dan ke-20 memang berada dalam cengkraman Bangsa-Bangsa Eropa. Patut dicatat bahwa kesadaran ini tidak langsung berupa semangat nasionalisme (kebangsaan). Kesadaran yang muncul tetap dilandasi oleh semangat keagamaan, Islam. Kesadaran inilah yang kemudian melatari lahirnya gerakan atau organisasi Islam modern. Organisasi Islam ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap proses perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Kontribusi ini bukan hanya dalam bentuk perjuangan bersenjata melawan penjajah kolonial, tetapi juga bersifat pemikiran. Beberapa organisasi tersebut adalah Jami'at al-Khair, al-Irsyad al-Islamiyah, dan Sarekat Islam.

Bagi bangsa Melayu, kehadiran organisasi modern ini menjadi tempat bagi mereka menyalurkan identitas politik pasca runtuhnya institusi politik mereka, kerajaan atau kesultanan. Hal ini kemudian menjadikan organisasi modern tersebut berkembang pesat di berbagai wilayah di nusantara. Organisasi inilah yang kemudian menjadi titik temu awal persentuhan antara ideologi Islam dan paham kebangsaan (nasionalisme). Persentuhan ini terjadi ketika di Indonesia bangkit kelas baru, terutama kelas menengah terpelajar

yang mengenyam pendidikan modern, ikut masuk dan ikut bergabung dalam Sarekat Islam. (Kuntowijoyo: 1994)

Elit baru ini sangat berperan dalam menumbuhkan persepsi baru tentang nasionalitas berdasarkan pengalaman bersama menghadapi penjajah. Mereka merikat berbagai potensi yang genuine dalam masyarakat. Tradisi mereka menjadi bagian integral nasionalisme. Kaum terpelajar ini mengambil inisiatif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa 'nasional' Tanah Air Indonesia - dalam lingkup geografis kekuasaan colonial Belanda- sebagai batas-batas wilayah nasionalisme. Demikian pula berbagai suku bangsa di kepulauan Nusantara terikat dengan pengalaman sejarah yang sama sebagai 'bangsa Indonesia'.

Dapat dikatakan bahwa bagi bangsa Melayu, ide nasionalisme merupakan sesuatu yang baru karena sama sekali berbeda dengan budaya politik yang mereka kenal selama ini. Namun kesamaan penderitaan di masa lalu dan harapan yang ingin diraih di masa depan membuat mereka menerima ideologi baru tersebut dan menjadikannya sebagai landasan dalam pembentukan negara bangsa di nusantara.

Patut dicatat bahwa tema sentral yang sama yang dikembangkan pada fase protonasionalisme atau nasionalisme awal ini berupa penciptaan dan penggalangan semangat nasionalitas vis a vis penjajah. Inilah yang kemudian menjadi babak baru bagi politik Melayu di masa penjajahan. Hanya saja, Represi dan koersi yang dilakukan pemerintah Belanda mengakibatkan dimensi politis nasionalisme dalam fase ini tidak bisa mekar secara sempurna. Karena itu, yang lebih menonjol dalam pertumbuhan nasionalisme adalah penggalangan dimensi-dimensi sosial dan kultural. Ini juga terjadi pada organisasi-organisasi protonasionalis yang muncul dan berkembang, seperti dapat dilihat dari organisasi sejak Budi Utomo, Jong Java, Jong Islamieten Bond, sampai Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam. Agaknya, melalui organisasi-organisasi inilah, politik Melayu bermetamorfosis ikut mengukung nasionalisme sebagai 'identitas baru', setelah sebelumnya diwarnai oleh faktor 'agama (Islam)' dan mewujudkan dalam institusi kerajaan (kesultanan).

Tahap kedua perkembangan nasionalisme, dimulai pada masa pendudukan Jepang (1940-1945) yang merupakan katalis dalam mengakselerasi pertumbuhan nasionalisme di Asia Tenggara. Dengan slogan anti barat-nya, Jepang dengan sengaja mendorong pertumbuhan nasionalisme lokal di kawasan ini. Bahkan Jepang memberikan peluang - betapapun

terbatasnya – kepada para pemimpin lokal untuk membicarakan masa depan wilayah dan bangsa mereka masing-masing. Dapat dikatakan bahwa pada tahap kedua ini, nasionalisme mulai menjadi lebih bermuatan politis ketimbang sosial dan kultural seperti periode sebelumnya. Tema yang menguat dalam nasionalisme kedua ini adalah memupuk keutuhan dan integritas negara dan bangsa yang akan segera terwujud.

Pada tahapan ini, identitas politik melayu juga mengikuti arus gagasan nasionalisme yang berubah tersebut. Bangsa Melayu tidak lagi memperjuangkan berdirinya institusi politik -kerajaan/kesultanan- yang telah runtuh akibat kolonialisasi Belanda, tetapi turut berjuang melalui organisasi untuk menyuarakan nasionalisme politik untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, sikap Jepang yang terkesan ‘mendua’ mengakibatkan terciptanya konflik antar kepemimpinan nasionalis dan kepemimpinan yang berakar pada sentimen keagamaan (Islam). Pada awalnya, penguasa Jepang lebih memberi gerak kepada para pemimpin agama dan ulama. Tetapi menjelang berakhirnya pendudukan, Jepang kembali menoleh kepada kelompok nasionalis sehingga kepemimpinan agama pada akhirnya harus melakukan kompromi untuk meratakan jalan bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia dengan menerima Pancasila sebagai ideologi nasional.

Perdebatan juga terjadi pada perumusan dasar negara, Pancasila. Sebelumnya, konsep ‘Piagam Jakarta’ yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, memberi jaminan untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi, satu hari setelah kemerdekaan (tanggal 18 Agustus 1945) konsep tersebut dicoret dan diganti hanya dengan kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Suatu kalimat yang sangat netral, punya banyak makna, tetapi cukup merugikan dalam artian politik umat Islam. Sementara bagi kalangan non muslim dan kelompok nasionalis, ini merupakan kemenangan telak. (Saifullah: 2010) Boleh jadi, karena alasan bahwa Indonesia sedang berjuang bagi kemerdekaan yang baru lahir, umat Islam secara umum tidak keberatan dengan adanya pencoretan tersebut, tetapi akan berjuang untuk mengembalikannya jika waktu dan kondisi sudah lebih baik. (Munhanif: 2002)

Agaknya, inilah akhir dari identitas politik tradisional Melayu, sebagai bagian dari budaya Melayu yang telah eksis di bumi Nusantara sejak berabad-abad lalu. Jika sebelumnya identitas itu berupa institusi kerajaan atau kesultanan berbasis agama Islam, maka setelah Indonesia berdiri, berubah identitas ini berubah menjadi menjadi negara bangsa. Dengan disepakatinya

bentuk negara dan dasar negara maka kesempatan untuk mendirikan sebuah negara Islam di bumi Nusantara pun tertutup.

Puncak nasionalisme Indonesia sendiri tercapai pada masa Soekarno, presiden pertama Indonesia. Berkat kemampuan retorika dan intelektualnya, ia berhasil menggelorakan nasionalisme Indonesia, khususnya vis a vis kekuatan-kekuatan yang disebutnya sebagai neokolonialisme imperialisme (nekolim). Bahkan tidak hanya menjadi perumus nasionalisme Indonesia, Soekarno 'seolah' didaulat menjadi juru bicara nasionalisme yang paling artikulatif, baik bagi Indonesia maupun bagi negara-negara yang baru bebas dari cengkraman imperialisme Barat.

Sikap Soekarno yang tegas pada nasionalisme Indonesia semakin menutup peluang bagi umat Islam (Bangsa Melayu) menegakkan identitas politiknya. Walaupun telah berjuang dengan membentuk Partai Islam dan menyalurkan hak politik pada Pemilihan Umum untuk menegakkan ideologi Islam, tetapi selalu kandas. Soekarno sendiri, walaupun pernah berjanji memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk memperjuangkan ideologi Islam, justru kemudian ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara nasional, bukan negara Islam. Inilah awal terjadinya polarisasi ideologi atau dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara Islam dan Kebangsaan. Selanjutnya, semakin lama posisi Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat, sehingga posisi Islam hanya sebagai agama pribadi.

Berakhirnya kekuasaan Soekarno menyusul kegagalan kudeta berdarah PKI tahun 1965 menandai berakhirnya fase kedua nasionalisme. Indonesia kemudian memasuki fase ketiga nasionalisme yang ditandai dengan bangkitnya Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Bersama dengan militer yang merasa traumatis dengan pengalam politik di era sebelumnya, Soeharto segera melancarkan program modernisasi dan industrialisasi, yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan. Disini, nasionalisme politik mulai disurutkan, dan penekanan diberikan pada nasionalisme ekonomi yang tidak jarang mengharuskan Indonesia meredam nasionalisme politiknya yang pernah berkobar-kobar.

Pada awal Orde Baru, partai-partai politik Islam - yang menjadi wadah bagi umat Islam menyalurkan aspirasi politik untuk penegakan syariat Islam terutama bagi para pemeluknya, relatif bersatu. Mereka bahu membahu memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dalam sidang MPRS, misalnya,

mereka bersatu dalam melawan isu sekularisme dan Kristenisasi dan dalam mengancam pornografi dan perjudian. (Syamsuddin: 2001)

Hanya saja, perjuangan umat Islam menegakkan identitas politik (Melayu) Islam tetap kandas di masa Orde Baru. Mereka berhadapan dengan agenda politik rezim Orde Baru yaitu depolitisasi Islam. Proyek ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam yang kuat secara politik akan menjadi hambatan bagi modernisasi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan depolitisasi politik Islam, Rezim Orde Baru juga menerapkan aturan di bidang ideologi politik yaitu keharusan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, atau satu-satunya asas oleh semua organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan di tahun 1985. Dengan penerapan asas tunggal ini maka tidak ada peluang lagi bagi Melayu (Islam) membangkitkan kembali ideologi politik tradisional masa lalu. Selanjutnya, identitas politik (Islam) Melayu benar-benar hilang ketika berhadapan dengan negara bangsa. Boleh jadi, ideologi tersebut tidak benar-benar hilang, tetapi bertransformasi dalam bentuk lain, seperti mendirikan institusi politik institusi sosial keagamaan (partai Islam dan organisasi sosial keagamaan).

Semua ini sekaligus membuktikan bahwa ajaran Islam telah meresap ke dalam Bangsa Melayu dan berakulturasi sedemikian rupa dan telah mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Penjajahan yang meluluhlantakkan institusi politik tradisional, dan tekanan penguasa yang memaksakan depolitisasi Islam dan penerapan asas tunggal, tidak mampu mengubah corak dan warna kehidupan sosial kemasyarakatan Melayu. Islam tetap bertahan, walaupun terdapat masalah dan cobaan dalam sejarah panjang eksistensinya dalam Budaya Masyarakat Melayu.

Seperti dimaklumi bahwa Islam yang berkembang di kawasan Melayu Nusantara adalah Islam yang dikenal fleksibel, adaptif dan bersifat terbuka dengan budaya-budaya yang ada, bahkan dengan gagasan atau ide-ide baru. Ini tidak lain karena karakter masyarakat Melayu yang banyak tinggal di daerah pesisir menjadikan mereka cenderung mudah menerima segala kebudayaan, bahkan ajaran agama. Sementara para pembawa agama Islam, baik kalangan pedagang atau guru sufi, cenderung mengikuti atau beradaptasi terhadap kebudayaan serta lingkungan yang ada di Nusantara. Inilah yang membuat ajaran Islam dan proses Islamisasi di Nusantara berjalan damai serta efektif tanpa kekerasan. (Ahmad: 2017)

Pada gilirannya, semua ini menjadikan wajah Islam Indonesia sebagai wajah Islam yang tersenyum, toleran, akomodatif dan inklusif. Islam yang melekat dalam budaya sehingga tidak bisa dipisahkan. Menilik dari karakter Islam yang berkembang dan menjadi dasar budaya Melayu, tidak heran gagasan negara bangsa dapat diakomodasi dalam sistem budaya Melayu, menjadi identitas baru politik Islam Melayu. Aktivitas politik Masyarakat Melayu pun bertransformasi ke dalam institusi politik modern, seperti partai politik, atau yang lainnya.

KESIMPULAN

Identitas politik Melayu merupakan bahagian dari Budaya Melayu yang terbentuk dari sejarah panjang sebagai hasil persentuhan budaya asli masyarakat Melayu dengan berbagai unsur luar yang datang ke wilayah Nusantara, seperti agama Islam. Pada gilirannya, kehadiran Islam memberi warna baru dan menjadi fondasi utama bagi budaya Melayu, walaupun pada sistem politik, tampaknya tidak banyak mengubah esensi entitas politik Melayu yang sudah ada sebelumnya, yaitu Raja dan Kerajaan. Seiring dengan perubahan sosial politik di kawasan ini, berupa kolonialisasi Barat, identitas politik Islam Melayu mulai berhadapan dengan gagasan politik baru yang dikembangkan oleh kelas menengah terdidik di wilayah Nusantara, yaitu konsep negara bangsa (nation state). Perjumpaan ini berlangsung secara terus menerus pada selama tiga tahapan pembentukan nasionalisme Indonesia. Pada setiap tahapan, identitas politik (Islam) Melayu selalu mengalami benturan dan tantangan, hingga akhirnya bersikap adaptif terhadap konsep negara bangsa sebagai identitas politik (Islam) yang baru. Dapat dipahami mengapa sikap adaptif ini muncul pada Budaya Melayu. Ini tidak lain karena karakter masyarakat Melayu yang cenderung mudah menerima perubahan karena pengaruh kondisi geografis wilayah dan ajaran Islam yang dianut – umumnya – adalah Islam yang inklusif. Inilah yang kemudian membentuk wajah Islam Melayu yang cenderung toleran dan mudah beradaptasi dengan sesuatu yang baru, terutama jika pemikiran baru tersebut dinilai membawa manfaat secara umum atau luas.

REFERENSI

- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Edisi Perennial*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013
- , *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999
- Bahtiar Effendy dan Ali Munhanif, 'Indonesia Pasca Kemerdekaan', dalam Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Cornelis Lay, "Nasionalisme dan Negara Bangsa", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10 No. 2, Nopember 2006
- Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ellya Roza, *Sejarah Tamaddun Melayu*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, Riau: Kalimedia, 2018
- J. Suyuthi Pulungan, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*, Yogyakarta: Gama Media, 2006
- , *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019
- Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: Mizan, 2012
- Jumal Ahmad, *Islam Asia Tenggara: Dinamika Historis dan Distingsi*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1987
- Muhammad Mustaqim dan Muhammad Miftah, "Tantangan Negara Bangsa (Nation State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam", dalam *Jurnal ADDIN*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2007
- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Saifullah, SA, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Azyumardi Azra, *Islam Nusantara (1)*, Kamis, 18 Juni 2015